

FAKTOR DAN STRATEGI PENANGGULANGAN PENGANGGURAN TERDIDIK DI PROVINSI JAMBI

Factors And Treatment Strategies Education Unemployment In Jambi Province

Sisilia Nurteta

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura Jambi

Diterima : 10 Juni 2021; Direvisi: 13 Juli 2021; Disetujui : 31 Agustus 2021

DOI : <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.116>

Abstract

Unemployment is a major problem in the economy of Jambi Province. The impact of this condition is not only on the economy but also causes social problems. This study aims to analyze the factors that influence educated unemployment and provide a number of policy recommendations regarding the prevention of educated unemployment in Jambi Province. The research method used to answer the objectives of this study uses a panel data regression approach and SWOT analysis. The results of the study show that the high unemployment group with higher education reflects a mismatch, this is because the skills of the workforce have not met the specifications required by the business world and industry. Another factor is the high cause of educated unemployment because the workers themselves tend to choose jobs because they have a high bargaining position. Therefore, from the results of this study, it can be recommended as follows: the paradigm of the workforce should be shifted from looking for work towards job creation through the creation of new entrepreneurs by utilizing superior local resources in Jambi Province, Building solid cooperation between relevant stakeholders, both government, the business world/industrial world and universities through employment communication forums in an effort to reduce educated unemployment in Jambi Province, provide internship opportunities in the business world and industry that are more applicable and facilitate easy access to business capital through unsecured credit programs with easy administrative requirements

Keywords: Educated Unemployment, Strategy, Employment

Abstraks

Pengangguran merupakan masalah utama dalam perekonomian Provinsi Jambi. Dampak dari kondisi ini tidak hanya terhadap perekonomian namun menimbulkan permasalahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik serta memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan tentang penanggulangan pengangguran terdidik di Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan Tingginya kelompok pengangguran berpendidikan tinggi mencerminkan adanya mismatch, hal ini disebabkan keterampilan tenaga kerja belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Faktor lain tingginya penyebab pengangguran terdidik karena tenaga kerja itu sendiri cenderung memilih pekerjaan karena memiliki bargaining position yang tinggi. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai berikut paradigma angkatan kerja hendaknya digeser dari mencari pekerjaan kearah penciptaan lapangan kerja melalui penciptaan wirausaha baru dengan memanfaatkan sumber daya lokal unggulan yang ada di Provinsi Jambi, Membangun kerjasama yang solid antara stackholder terkait, baik pemerintah, dunia usaha/dunia industri dan perguruan tinggi melalui forum komunikasi ketenagakerjaan dalam upaya menekan pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, memberikan kesempatan magang di dunia usaha dan dunia industri yang lebih aplikatif dan memfasilitasi kemudahan akses permodalan usaha melalui program kredit tanpa agunan dengan persyaratan administrasi yang mudah

Kata Kunci : Pengangguran Terdidik, Strategi, Ketenagakerjaan

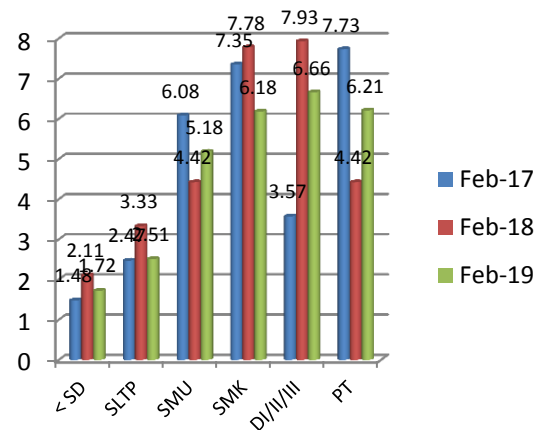
PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS,2016).

Dalam penelitiannya Pihanto (2012) menyatakan masalah pengangguran terbuka dan berpendidikan akan berdampak pada merosotnya daya beli masyarakat, serta menurunnya produktivitas masyarakat. Selain itu, meningkatnya pengangguran dapat mempengaruhi kondisi sosial dan politik yang serius, seperti meningkatnya kriminalitas dan gangguan terhadap stabilitas politik negara.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Menurut BPS Provinsi

Jambi, TPT Provinsi Jambi pada Februari 2018 sebesar 3,65 persen, turun menjadi 3,62 persen pada Februari 2019.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi (persen), Feb 2017 – Feb 2019 Provinsi Jambi

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2019

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk pendidikan Diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 6,66 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada jenjang Universitas sebesar 6,21 persen dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 6,18 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Diploma (I/II/III) dan Universitas serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

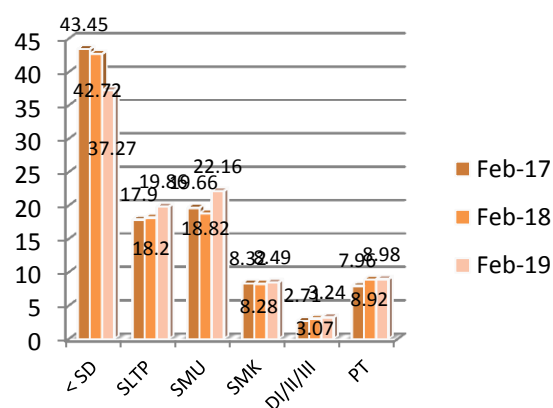
Gambar 1 juga merefleksikan dalam setahun terakhir, bahwa

persentase pengangguran lulusan perguruan tinggi DI/II/III mengalami penurunan dari 7,93 persen pada Februari 2018 menjadi 6,66 persen pada Februari 2019. Namun angka tersebut masih cukup tinggi. Sebaliknya persentase pengangguran lulusan universitas meningkat dari 4,42 persen pada Februari 2018 menjadi 6,21 persen pada Februari 2019.

Sementara penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2019 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 641,29 ribu orang (37,27 persen), Pendidikan SMP sebanyak 341,68 ribu orang (19,86 persen), SMU sebanyak 381,31 ribu orang (22,16 persen) dan SMK sebanyak 146,09 ribu orang (8,49 persen). Sementara itu penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) ada sebanyak 210,28 ribu orang (12,22 persen) mencakup pendidikan Diploma sebanyak 55,72 ribu orang dan Universitas sebanyak 154,56 ribu orang.

Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja yang meningkat adalah mereka yang berpendidikan SMA (3,34 persen poin), SMP (1,66 persen poin), SMK (0,17 persen poin), Diploma (0,17 persen poin) dan universitas (0,07 persen poin). Sementara penurunan persentase terjadi pada penduduk

bekerja berpendidikan SD ke bawah (5,45 persen poin).



Gambar 2. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi (persen), Feb 2017–Feb 2019 di Provinsi Jambi

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2019

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi (2019) jika dibandingkan antara pencari kerja terdaftar dengan lowongan kerja terdaftar di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa kesempatan kerja terbatas, yakni angka antara pencari kerja terdaftar sebanyak 16.088 orang sedangkan lowongan kerja terdaftar hanya 6.267 orang. Semakin terbatasnya kesempatan kerja menjadikan persaingan antar angkatan kerja sangat ketat. Masalah ini menimbulkan pengangguran pada angkatan kerja yang belum terserap di lapangan pekerjaan. Situasi ini pada akhirnya menempatkan para pencari kerja dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Mencermati ketatnya persaingan dunia kerja pada saat sekarang ini, tidak hanya perguruan tinggi yang dituntut untuk mampu mendidik mahasiswanya dengan tepat dan benar sesuai perkembangan zaman. Para mahasiswa dan calon mahasiswa pun diharuskan mampu untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik, agar nantinya ketika lulus mereka merupakan lulusan yang berkualitas, berdaya saing dan mampu menghadapi perkembangan zaman yang cepat berubah.

Oleh karena itu dirasakan penting untuk dilakukan kajian mengenai faktor dan strategi penanggulangan pengangguran terdidik di Provinsi Jambi dengan harapan teridentifikasi pola pengangguran terdidik di Provinsi Jambi apakah murni merupakan mekanisme pasar (*market clearing*) tenaga kerja yang akan kembali ke tingkat keseimbangan dan mampu melakukan *self correction* dalam jangka pendek, ataukah merupakan masalah struktural yang dapat berlangsung lama dan membutuhkan kebijakan komprehensif yang tepat untuk mengatasinya.

Permasalahan pengangguran terdidik di Provinsi Jambi yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada : menganalisis faktor-faktor yang

berpengaruh dan menyebabkan terjadinya pengangguran terdidik dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam program penanggulangan pengangguran khususnya pengangguran terdidik.

I. Landasan Teori Hubungan Pendidikan Dengan Pengangguran

Pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dengan kata lain, tujuan akhir program dari pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Setidaknya setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi yang lebih tinggi di bandingkan dengan sektor informal. Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Maka merembaknya isu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencanaan pendidikan di negara-negara berkembang. Dengan demikian jika proses perjalanan pendidikan sepanjang masa ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat

kenyataan bahwa kemajuan dalam pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Penyebab Terjadinya Pengangguran Terdidik

Secara kualitatif, kualitas tenaga kerja nasional meningkat disebabkan dua hal. Pertama, pembangunan ekonomi pada tingkat tertentu berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat lebih mampu membiayai pendidikan formal dan mengakomodasi makanan bergizi yang membantu kualitas tenaga kerja. Kedua, berbagai kebijakan di bidang pendidikan nasional yang mempermudah jangkauan terhadap pendidikan membawa peningkatan pada kualitas pendidikan formal angkatan kerja. Akan tetapi, pada saat angkatan kerja terdidik meningkat dengan pesat, lapangan kerja masih didominasi sektor-sektor *subsistent* yang tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan. Ini menimbulkan gejala *supply induce* di mana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat terhadap

kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal.

Secara makro, pengangguran terdidik juga disebabkan oleh transformasi struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) yang tidak diikuti oleh transformasi penyerapan tenaga kerja. Periode 1980-98, penyerapan tenaga kerja sektor primer turun 9 persen menjadi 47 persen, sementara sektor sekunder dan tersier hanya meningkat 3 persen dari 23 persen. Di lain pihak kontribusi sektor primer terhadap PDB turun sebesar 9 persen menjadi 15 persen sementara sektor sekunder dan tersier meningkat sekitar 14 persen menjadi 27 persen. Tampaknya gejala tersebut diakibatkan pola perkembangan industri saat ini yang kurang berbasis pada permasalahan nasional yang sifatnya seolah tenaga kerja berlebih (*surplus*) padahal karena permintaan yang kecil.

Dengan demikian, disamping membangun industri skala besar yang sifatnya padat modal dan teknologi, perhatian juga sudah seharusnya diberikan pada pengembangan industri yang lebih berorientasi pada penyerapan tenaga kerja terdidik yang

tidak hanya jumlahnya besar tetapi juga tumbuh dengan sangat cepat.

Perlu juga penanganan serius terhadap tingginya persentase lulusan Sekolah Menengah Umum yang menganggur (lebih tinggi daripada Sekolah Menengah Kejuruan). Hal ini karena pada dasarnya SMU umum dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi, pada hal untuk masuk ke dunia perguruan tinggi, selain tempat terbatas, mahal biaya juga menjadi kendala utama.

Berbagai perubahan menyangkut penjurusan di tingkat menengah atas tampaknya tidak akan mampu menjawab permasalahan kualitas angkatan kerja golongan pendidikan ini. Seharusnya, kurikulum Sekolah Menengah Umum sekarang mendapat proporsi keterampilan praktis sehingga bilamana lulusan SMU tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, paling tidak sudah memiliki bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk dunia kerja. Apa yang terjadi sekarang adalah, mayoritas angkatan kerja berpendidikan Sekolah Menengah Umum bekerja di sektor perdagangan dan sektor informal yang produktivitasnya relatif rendah. Selain itu, di tengah membengkaknya jumlah penganggur, ternyata lowongan kerja yang belum terisi cenderung

meningkat serta porsinya terhadap lowongan kerja relatif besar.

II. Metode Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data - data ekonomi yang berasal dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam menganalisis data tersebut menggunakan analisis regresi data panel. Data panel yaitu penggabungan antara data *time series* (data dari satu individu tertentu untuk satu rentang waktu tertentu) dengan data *cross section* (data yang terdiri dari n observasi n individu dalam satu titik waktu tertentu). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel dari SAKERNAS Tahun 2017-2018 dari BPS. Sedang variabel yang digunakan antara lain variabel demografi, tingkat pendidikan, pekerjaan utama dan pengalaman kerja.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis kondisi pengangguran terdidik dan implikasi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya penurunan pengangguran terdidik. Analisis kuantitatif menggunakan analisis panel data untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran

terdidik di Provinsi Jambi. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi *Eviews 7* dan *Microsoft Excel*.

Model yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran terdidik di Provinsi Jambi adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dirinci menurut kabupaten/kota dan provinsi tahun 2011 sampai tahun 2018 kecuali tahun 2016. Dengan 12 data *cross section* yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi. Sedangkan data *time series* adalah 7 tahun, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 dan 2018.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel tak bebas dan variabel bebas. Variabel tak bebas yang digunakan adalah variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terdidik. Untuk variabel ini membutuhkan 2 indikator pembentuk yaitu data pengangguran dan data angkatan kerja. Dikarenakan TPT yang akan digunakan adalah TPT terdidik, maka

data pengangguran dan angkatan kerja yang dibutuhkan adalah khusus untuk lulusan diploma dan universitas. Kedua data ini diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus. Berikut adalah model yang digunakan dalam penelitian ini.

$$Y_{it} = a_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + e$$

Keterangan :

- a_0 = *intersept*
- β = Koefisien regresi
- Y_{it} = Pengangguran Terdidik
- X_{1it} = Pertumbuhan Ekonomi
- X_{2it} = Gini Ratio
- X_{3it} = IPM
- X_{4it} = Kemiskinan
- X_{5it} = Produktivitas TK
- X_{6it} = TPAK
- e = *error*
- l = data *cross section* kab/kota di Provinsi Jambi
- t = data *time series*

Untuk memberikan rekomendasi pada implikasi kebijakan dan strategi menanggulangi permasalahan pengangguran terdidik di Provinsi Jambi digunakan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal

mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*).

Guna menjawab tujuan penelitian ini, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, dilakukan uji inferensial dengan menggunakan regresi linier data panel.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.49810	15.28655	-1.929676	0.0573
EKONOMI	0.662873	0.329546	2.011473	0.0478
GINI	-17.74797	13.45767	-1.318799	0.1911
IPM	0.299756	0.143644	2.086799	0.0402
KEMISKINAN	-0.086338	0.204865	-0.421440	0.6746
PRODUKTIVITAS	0.005072	0.010863	0.466897	0.6419
TPAK	0.246922	0.135420	1.823372	0.0721
R-squared	0.140129	Mean dependent var		5.405238
Adjusted R-squared	0.073126	S.D. dependent var		4.221772
S.E. of regression	4.064482	Akaike info criterion		5.722105
Sum squared resid	1272.041	Schwarz criterion		5.924673
Log likelihood	-233.3284	Hannan-Quinn criter.		5.803535
F-statistic	2.091379	Durbin-Watson stat		1.886820
Prob (F-statistic)	0.063767			

Tabel 1. Pengaruh Faktor-Faktor Indikator Makro Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi, Tahun 2011-2018

Sumber : Data diolah, 2019

Hasil Uji Koefisien Regresi Bersama-sama (Uji F), menghasilkan nilai probabilita sebesar 0,063767. Hal ini menggambarkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas dalam signifikansi 10 persen. Selanjutnya dari hasil koefisien determinasi (*R squared*) menghasilkan angka sebesar 0,140129 yang berarti bahwa penyebab pengangguran terdidik di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh variabel bebas didalam model

sebanyak 14 persen, sedangkan sisanya sebesar 86 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Berdasarkan hasil riset penghitungan terhadap data panel dengan *common effect* model, maka didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -29,498 + 0,663 PE - 17,748 \text{ Gini Ratio} + 0,2998 \text{ IPM} - 0,086 \text{ Kemiskinan} + 0,005 \text{ Prod. TK} + 0,247 \text{ TPAK}$$

Hasil regresi panel *common effects* diatas, diperoleh kesimpulan

bahwa tidak semua indikator makro sosial ekonomi yang digunakan sebagai variabel bebas terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di kabupaten/kota dan juga di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel laju pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai *prob* 0,0478 < 0,05 sehingga menolak H_0 atau yang berarti variabel laju pertumbuhan ekonomi terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, dalam tingkat kepercayaan 5 persen.

Hal ini disebabkan laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu wilayah, dan dalam penelitian ini terbukti bahwa variabel ini mempengaruhi terjadinya pengangguran terdidik. Variabel gini ratio mempunyai nilai *prob* 0,1911 > 0,05 sehingga menerima H_0 atau yang berarti variabel gini ratio terbukti tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, dalam tingkat kepercayaan 5 persen. Hal ini menandakan bahwa penyebab terjadinya pengangguran terdidik bukan dikarenakan perbedaan atau ketimpangan pendapatan. Fenomena yang terjadi pada penganggur terdidik adalah cenderung memilih pekerjaan,

karena memiliki pendidikan yang tinggi. Proses mencari kerja lebih lama pada kelompok tenaga kerja terdidik disebabkan tenaga kerja terdidik lebih mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja, dan lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak disukai (Sutomo et al.,1999).

Variabel IPM mempunyai nilai *prob* 0,0402 < 0,05 sehingga menolak H_0 atau yang berarti variabel IPM terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, dalam tingkat kepercayaan 5 persen.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk dari 3 jenis indikator yang berbeda, yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran perkapita. Ketika ketiga indikator ini digabung menjadi IPM, hal ini justru terbukti mempengaruhi terjadinya pengangguran terdidik di Provinsi Jambi. Variabel tingkat kemiskinan mempunyai nilai *prob* 0,6746 > 0,05 sehingga menerima H_0 atau yang berarti variabel tingkat kemiskinan terbukti tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, dalam tingkat kepercayaan 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya pengangguran terdidik

bukan disebabkan oleh faktor kemiskinan, Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Fithrian, Syechalad, & Nasir (2015) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan atau kemiskinan di Aceh.

Penganggur terdidik lebih cenderung untuk memilih menganggur daripada bekerja jika pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Atau dengan kata lain, penyebab menjadi pengangguran terdidik adalah bukan karena miskin. Variabel produktivitas tenaga kerja mempunyai nilai *prob* 0,6419 > 0,05 sehingga menerima H_0 atau yang berarti variabel produktivitas tenaga kerja terbukti tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, dalam tingkat kepercayaan 5 persen.

Produktivitas tenaga kerja mencerminkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja di suatu wilayah tertentu, dan dalam penelitian ini terbukti bahwa variabel ini tidak mempengaruhi pengangguran terdidik. Variabel TPAK mempunyai nilai *prob* 0,0721 < 0,10 sehingga menolak H_0 atau yang berarti variabel TPAK terbukti memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, dalam tingkat kepercayaan 10 persen. Hal ini mendukung studi empiris yang dikemukakan oleh Sari (2015), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran terdidik artinya setiap perubahan yang terjadi pada tingkat pendidikan mengakibatkan berubahnya pengangguran terdidik, yaitu disaat tingkat pendidikan meningkat juga menyebabkan pengangguran terdidik mengalami peningkatan.

3.2. Strategi Penanggulangan Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi

Lulusan perguruan tinggi mengalami dilema sebab gelar ijazah pendidikan tinggi yang mereka raih tidak lagi menjamin mudah mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut merupakan masalah serius apalagi dalam menghadapi bonus demografi dan revolusi industri 4.0. Banyak faktor yang menyebabkan mereka sulit terserap dunia kerja atau mereka belum mampu menjadi seorang wirausaha, sehingga mereka menjadi penganggur. Hasil penelitian, dari faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengangguran terdidik dapat dijelaskan pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Kekuatan dan Kelemahan Penganggur Terdidik di Provinsi Jambi

No	Kekuatan	Bobot	Rating	Score
1	Pengangguran lulusan Perguruan Tinggi memiliki kompetensi akademik yang baik.	0,0454	2	0,0909
2	Informasi lowongan kerja disampaikan melalui website OPD terkait dan sosial media, asosiasi-asosiasi.	0,0454	3	0,1363
3	Tersedia pelatihan keterampilan bagi TK oleh Disnakertrans Kabupaten/Kota dan BLKI.	0,0568	3,5	0,1988
4	Disnakertrans Provinsi Jambi memiliki program unggulan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.	0,0681	3	0,2045
Total				0,6306
No	Kelemahan	Bobot	Rating	Score
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia pada pasar kerja relative sedikit.	0,0681	2	0,1363
2	Sedikitnya informasi lapangan pekerjaan yang disampaikan oleh Disnakertrans sehingga informasi yang didapatkan oleh pencari kerja terbatas.	0,0681	2	0,1363
3	Lemahnya koordinasi antara Disnakertrans dengan pencari kerja dengan pemberi kerja.	0,0681	3	0,2045
4	Kebanyakan lulusan perguruan tinggi mencari sendiri informasi lowongan kerja.	0,0681	2	0,1363
5	Tidak semua Disnakertrans Kabupaten/Kota melaksanakan Job Fair secara periodik.	0,0681	2	0,1363
6	Keterbatasan mengakses informasi JOB Fair dan lowongan kerja terutama yang berada di desa dan kecamatan.	0,0681	2	0,1363
7	Lulusan perguruan tinggi cenderung memilih pekerjaan dengan pendapatan relative besar.	0,0681	2	0,1363
8	Penganggur lulusan perguruan tinggi di desa belum memiliki kreatifitas dan inovasi untuk mengolah SDA desa	0,0681	2,5	0,1704
9	Rendahnya <i>soft skill</i> dan etos kerja, tenaga kerja.	0,0681	2	0,1363
10	Kurang fokusnya jenis pelatihan dari Disnakertrans & BLK untuk lulusan perguruan tinggi.	0,0681	3	0,2045
11	Disnakertrans belum menyediakan data rekapitulasi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan.	0,0568	2	0,1136
12	Pencari kerja yang telah diterima bekerja, sebagian besar tidak melaporkan ke Disnakertrans setempat.	0,0454	2	0,0909
Total				1,7386

Perbedaan antara kekuatan dan kelemahan S-W = 0,6306 - 1,7386 = (-1,108)

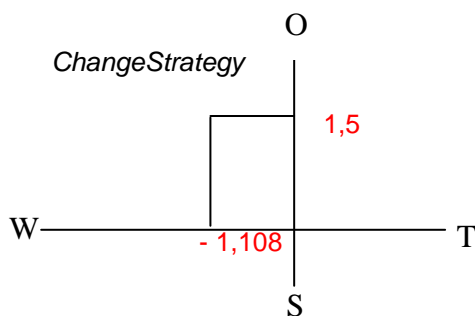
Tabel 3. Peluang dan Ancaman Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi

No	Peluang	Bobot	Rating	Score
1	Tersedianya lapangan pekerjaan, di sektor perkebunan baik didalam dan luar Provinsi Jambi.	0,0909	3	0,2727
2	BUMDes yang membutuhkan SDM lulusan perguruan tinggi.	0,0909	4	0,3636
3	Pasar kerja banyak membutuhkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki spesialisasi tertentu.	0,0909	3	0,2727
4	Dunia usaha mengutamakan pelamar kerja yang memiliki pengalaman kerja, bersedia ditempatkan di wilayah mana saja dan memiliki etos kerja yang baik.	0,0757	3	0,2273
5	Disnakertrans bersedia menjadi fasilitator bagi pengangguran untuk memasuki dunia kerja.	0,0909	3,5	0,3182
6	Desa memiliki SDA dan potensi unggulan yang belum dikelola secara maksimal terutama pengembangan industri hilir.	0,0909	4	0,3636
7	Perusahaan bekerja sama dengan perangkat desa dalam rekrut tenaga kerja lokal.	0,0909	3	0,2727
Total				2,0909
No	Ancaman	Bobot	Rating	Score
1	Dunia usaha memiliki informasi pasar tenaga kerja dari berbagai wilayah.	0,0909	1	0,0909
2	Persaingan yang ketat dari lulusan perguruan tinggi luar Provinsi Jambi.	0,0757	2	0,1515
3	Dunia usaha yang ada di Provinsi Jambi hanya membutuhkan 15% tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dari total seluruh tenaga kerja.	0,0909	1,5	0,1364
4	Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di dunia usaha terkait dengan fluktuasi perkembangan perekonomian.	0,0606	1	0,0606
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menimbulkan persaingan yang ketat.	0,0606	1	0,1515
Total				0,5909

Perbedaan antara peluang dan ancaman O-T : 2 = 2,0909 - 0,5909 = 1,5

Analisis SWOT berdasarkan pada faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan pada tabel 1 ditentukan melalui kemampuan akademik yang dimiliki oleh penganggur dan program penurunan pengangguran secara umum meskipun belum secara spesifik pada lulusan perguruan tinggi, jumlah lowongan kerja dan aksesnya. Analisis eksternal pada tabel 2 ditentukan melalui perilaku lulusan perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan dan sumber daya alam pedesaan yang menimbulkan peluang dan ancaman bagi penganggur. Maka strategi yang akan diterapkan dapat diilustrasikan pada gambar 3.

K.III.



Gambar 3. Diagram SWOT dan Implementasi Strategi Pengangguran Terdidik

Berdasarkan gambar 3, pengangguran berada pada kuadran III, yang mengubah strategi. Ini berarti harus ada perubahan strategi dalam menurunkan angka pengangguran terdidik di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil regresi panel bahwa laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mempengaruhi pengangguran terdidik. Dalam penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi apabila kualitasnya kurang maka dapat diindikasikan dengan laju pengangguran yang masih relative tinggi dan sulit atau lambat penurunannya (*persistent*). Artinya, tingkat pengangguran tidak pernah mencapai nol persen. Artinya diperlukan strategi dasar untuk menciptakan lapangan dan memperluas kesempatan kerja adalah suatu strategi pembangunan yang berorientasi untuk memberikan peluang pembukaan lapangan kerja yang produktif dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Maka diperlukan upaya peningkatan pendidikan bisnis bagi pengangguran terdidik yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pendidikan bisnis memiliki pengaruh positif terhadap *feasibility*, dan entrepreneurial *self-efficacy* (kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam mengatasi situasi dan menghasilkan sesuatu yang

menguntungkan), *feasibility* (pendidikan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis) memiliki pengaruh positif terhadap niat berwirausaha, *entrepreneurial self-efficacy* memiliki pengaruh positif terhadap niat berwirausaha, *entrepreneurial self-efficacy* memiliki pengaruh positif terhadap *feasibility*, dan pendidikan bisnis memiliki pengaruh positif terhadap niat berwirausaha baik secara langsung maupun melalui *feasibility* dan *entrepreneurial self-efficacy* (Marlina Deliana, Kusdi Rahardjo, Tri Wulida Afriyanti, 2019).

Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi lulusan perguruan tinggi perlu dipercepat sehingga tidak hanya bisa masuk ke dunia kerja, namun juga mampu menjadi wirausaha mengingat sedikitnya lowongan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Bagong Suyanto dan Septi Ariadi (2013) menemukan para lulusan perguruan tinggi (PT), dalam banyak kasus belum mampu memperlihatkan kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi dirinya sendiri. Para sarjana dan Diploma walaupun mereka sebagian adalah jebolan dari perguruan tinggi yang bergengsi, dan sebagian besar memiliki IPK di atas 3, ternyata hal itu bukan jaminan bakal dapat segera

memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Tidak sedikit lulusan PT ternyata kurang atau bahkan tidak menguasai bahasa asing, sehingga kurang memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan pasar kerja. Sebagian besar lulusan PT juga tidak memiliki koneksi yang bisa dimanfaatkan untuk mencarikan pekerjaan, sementara di saat yang sama akses mereka pada sumber-sumber permodalan juga kurang. Di tengah iklim persaingan mencari kerja yang makin kompetitif, akhirnya bisa dipahami jika sebagian lulusan PT akhirnya harus menganggur, baik untuk jangka waktu yang kurang dari setahun maupun lebih dari setahun.

Dari hasil *in dept interview* ditemukan adanya pengangguran yang tidak lulus tes tulis masuk suatu perusahaan karena kompetensi yang dimiliki pencari kerja belum *match* dengan keinginan pemberi kerja. Kondisi ini dipertegas hasil penelitian Musfira Nur, dkk (2016) menunjukkan bahwa mutu sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produktivitas tenaga kerja.

Seluruh informasi lowongan kerja yang tersedia dari perusahaan belum

ter-link dengan baik dengan pencari kerja diperparah lagi bahwa faktanya lowongan kerja yang tersedia hanya sedikit karena perusahaan membuka lowongan kerja pun sedikit. Studi ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Fitri dan Junaidi (2016) yang menemukan bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi.

Perubahan ini menekankan pada mudahnya akses informasi lowongan kerja bagi seluruh lulusan perguruan tinggi hingga ke wilayah pedesaan dengan menggunakan media sosial. Walaupun Dinaketrans telah menyediakan media sosial namun informasi tersebut masih sulit diakses, dikarenakan sumber daya manusia yang mengelola website terbatas. Kondisi ini senada dengan penelitian Antonio da Paixão Soares Pereira, dkk (2015) bahwa komunikasi yang dijalankan dalam implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) yang merupakan penjabaran pada tupoksi dari Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan yang termuat didalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008, belum berjalan efektif karena daya tanggap dari beberapa implementor program terhadap

perintah atasannya belum berjalan baik.

Sumber Daya yang ada yaitu sumber daya finansial dan sumber daya material berupa sarana dan prasarana sudah cukup memadai dalam mendukung pengimplementasian program "SIMU" akan tetapi untuk sumber daya manusia masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kemudian belum ada standard kerja yang jelas yang merupakan tolak ukur di dalam keberhasilan suatu program yang dijalankan.

Selain itu terjadi *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Ketidaksesuaian kualitas terjadi jika kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan tidak dipenuhi oleh pencari kerja. Beberapa hal yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja adalah mutu pendidikan, kemampuan (*skill*) dan teknologi. Jenis dan tingkat teknologi yang dimiliki suatu usaha akan mempengaruhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketika kedua hal tersebut tidak sesuai maka yang terjadi adalah munculnya pengangguran.

Maka dari itu, untuk menghindari kekhawatiran bagi penganggur terdidik terhadap aksesabilitas pekerjaan dan akseptabilitas di dunia kerja, pengangguran terdidik hendaknya tidak hanya bergantung pada kesempatan

kerja yang tersedia. Sebab banyak tersedia sarana dan pilihan untuk meniasati dunia kerja saat ini. Misalnya mampu memanfaatkan peluang yang ada di desa berupa keunggulan hasil daerah dan keunggulan geografis, dengan konsekuensi lulusan memiliki keterampilan menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Permasalahan pengangguran terdidik adalah masalah sosial bersifat sangat kompleks sehingga memerlukan pemecahan yang arif dan konseptual. Karena itu diharapkan dalam proses pemecahannya harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen/potensi meliputi pemerintah, dunia usaha, asosiasi perbankan serta masyarakat.

Menuju manusia unggul seperti dicita-citakan Presiden Jokowi membutuhkan langkah nyata. Salah satunya mendorong generasi millennial untuk berwirausaha secara kreatif, inovatif dan terukur, dengan begitu akan tercipta pengusaha baru dan lapangan pekerjaan baru. Maka mengurangi pengangguran terdidik perlu menciptakan lapangan kerja dengan kemandirian ekonomi kreatif. Penelitian Nasir (2017), menyatakan pemetaan industri kreatif subsektor industri kerajinan memiliki peran strategis dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran.

Hambatan berupa kesempatan kerja yang terbatas dapat dihadang melalui pembekalan wawasan ekonomi kreatif, sehingga dapat bersaing ditengah perekonomian yang sedang terpuruk saat ini. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi baru yang menginfestasikan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan pada ide dan *stock of knowledge* dari SDM sebagai faktor utama dalam kegiatan ekonominya.

Melihat fenomena masih tingginya angka pengangguran ini, tentunya pemerintah tidak diam begitu saja. Pemerintah merencanakan upaya-upaya untuk penurunan angka pengangguran ini dengan rencana yang terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan komitmen yang serius dari seluruh *stakeholder* untuk mengatasi pengangguran.

Implementasi komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan penciptaan lapangan kerja baik formal maupun informal, program padat karya, memperbanyak pelaksanaan bursa kerja (*job fair*) oleh pemerintah, swasta, perguruan tinggi, serta peningkatan SDM dengan membangun kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing.

Adapun strategi yang hendak diubah dapat dilihat pada Tabel 4 guna menurunkan pengangguran terdidik di Provinsi Jambi.

Strategi dalam upaya pengoptimalan strategi yang telah ada dan bentuk-bentuk sinergisitas antara tiga lembaga yakni pemerintah daerah, perguruan tinggi dan perusahaan. Maka diperoleh beberapa alternatif strategi guna menurunkan pengangguran terdidik yakni :

1) Strategi Kekuatan-Peluang (S-O)

Strategi yang mengutamakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, strategi ini mendukung kebijakan agraris, seperti :

- a. Dinaketrans dan perguruan tinggi memetakan potensi lulusan perguruan tinggi
- b. Menyelenggarakan *job fair* hingga di kecamatan
- c. Adanya sosialisasi dari perusahaan tentang standar kategori tenaga kerja yang dibutuhkan kepada perguruan tinggi

2) Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T)

Strategi yang digunakan untuk memafaatkan dan mengatasi ancaman dengan :

- a. Disnaketrans memfasilitasi MoU antara perguruan tinggi dengan perusahaan membentuk forum komunikasi

terkait tenaga kerja sehingga saling bersinergi dalam menyiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan

- b. Memperbanyak BLK dan mensinergikan dengan perusahaan dan perguruan tinggi misalnya BLK pengelola penghasil, pelatihan *e-bussines*

3) Strategi Peluang-Kelemahan (W-O)

Strategi yang meminimalkan kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang untuk memperbaiki kondisi internal menjadi sumber kekuatan baru.

- a. Meningkatkan jiwa wirausaha, kreatifitas, inovatif, *digital skill*, *global skill* bagi mahasiswa dan atau lulusan perguruan tinggi melalui:

- menambah waktu magang/pelatihan hingga 6 bulan
- Menambah jumlah mata kuliah yang berbasis industri kreatif
- Perguruan tinggi dan BLK memberikan ilmu *atitude* dan mental/psikologi di dunia kerja Seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta memastikan lulusannya menguasai minimal satu bahasa asing

- b. Mengembangkan industri hilir dengan memanfaatkan BUMDes
 - c. Menambah SDM pengelola *website* Dinaketrans guna mendapatkan informasi lowongan kerja dari perusahaan
 - d. Membuat aplikasi khusus berupa Pusat Informasi Peluang Kerja Terpadu beserta SOP keberhasilannya yang dapat diakses oleh perusahaan maupun lulusan perguruan tinggi
- 4) Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)
- Strategi yang mengarah pada kelemahan internal agar dapat bertahan dalam menghadapi tantangan, yaitu :
- a. Optimalisasi kerja sama antara perguruan tinggi dengan perusahaan yang memiliki lembaga latihan dalam menyiapkan tenaga kerja
 - b. Perguruan tinggi juga melaksanakan bursa kerja

IV. Penutup Kesimpulan

1. Variabel laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap

pengangguran terdidik. Sedangkan variabel gini ratio, tingkat kemiskinan dan produktivitas tenaga kerja terbukti tidak mempengaruhi pengangguran terdidik di Provinsi Jambi.

2. Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengangguran terdidik di Provinsi Jambi pada umumnya terjadi bukan disebabkan oleh kemiskinan, perbedaan pendapatan atau karena kekurangan output produksi. Namun lebih disebabkan oleh penganggur tersebut yang cenderung memilih pekerjaan.
3. Kondisi perekonomian wilayah, pembangunan manusia di wilayah tersebut dan partisipasi angkatan kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terdidik. Hal ini menandakan kondisi sosial dan perekonomian suatu wilayah berpengaruh terhadap keputusan menjadi penganggur terdidik. Menjadi penganggur, utamanya untuk penduduk dengan lulusan tinggi, justru menjadi suatu pilihan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Paradigma angkatan kerja dan ketenagakerjaan hendaknya digeser dari penyediaan dan perluasan lapangan kerja ke arah penciptaan wirausaha-wirausaha baru. Alasannya adalah penyelarasan antara ketersediaan lowongan pekerjaan dengan pencari kerja masih sulit tercapai, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat dan tetap, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat.
2. Pengembangan sumber daya manusia pengangguran terdidik diawali dengan :
 - a. Menginventaris dunia usaha/dunia industri pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan yang memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai upaya menciptakan manfaat bersama antara perusahaan dan masyarakat.
 - b. Melakukan kerja sama antara Disnakertrans dengan dunia usaha/dunia industri untuk memfasilitasi pelatihan bagi lulusan perguruan tinggi, misalnya pelatihan kerja khusus dalam waktu 3 sampai dengan 6 bulan.
3. Jenis pelatihan yang diberikan dapat dalam bentuk pelatihan ekonomi kreatif bagi pengangguran terdidik, pengelolaan keuangan mikro, *marketing (e-commerce)*, pelatihan yang berbasis produksi pertanian dan peternakan mengingat ketersediaan beberapa produk tersebut masih defisit dari hasil produksi sendiri, serta pelatihan untuk menciptakan komoditas yang bisa '*stand out*' dalam upaya membangun *brand value* untuk *brand image* potensi unggulan Provinsi Jambi.
4. Selain melalui pelatihan yakni dengan mentransformasikan penyebaran potensi pengusaha ke desa, di mana sumber kekayaan alam berada. Desa perlu disentuh untuk memaksimalkan potensi dalam perkembangan ekonomi dan

sosial dengan memanfaatkan BUMDes. Sebab dari Kemendes PDTT terkait program Dana Desa di dalamnya ada Program padat karya yang membuka peluang kesempatan kerja di desa. Programnya adalah gerakan *sosio-preneur* pemuda di Provinsi Jambi, mengajak pengangguran terdidik menjadi *sociopreneur* dalam pengembangan ekonomi kreatif di desa, melalui :

- a. Memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman alternatif profesi, termasuk menjadi wirausaha sosial. *Sociopreneur* dianggap sebagai sebuah profesi yang tak hanya dilirik dari segi outputnya saja, tetapi juga dari sisi prosesnya yang berpotensi dalam mengurangi masalah sosial. Konsep kolaborasi bisnis dan pemberdayaan masyarakat. kewirausahaan sosial tidak semata menyelesaikan

persoalan ekonomi, tetapi sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

- b. Menemukan sumber daya yang tepat dan model bisnis bagi wirausaha sosial dengan mengikuti kebiasaan masyarakat desa setempat yang memanfaatkan kearifan dan potensi sumber daya alam lokal. Dari sisi konsumen, terdapat segmen pasar yang memang sangat menghargai kearifan lokal. Misalnya agrobudaya.

5. Perguruan tinggi memasukkan tema kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan. Memperbanyak unit-unit usaha yang dikelola oleh mahasiswa, menjadi aktor utama untuk mengembangkan ekonomi kreatif guna melahirkan lulusan dengan mental dan sikap inovatif melalui incubator bisnis.

6. Setiap kabupaten/kota memiliki forum komunikasi antara pemerintah, dunia usaha/dunia industri, perguruan tinggi dalam upaya menyelaraskan kompetensi yang dibutuhkan pada lapangan kerja.
 7. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha melalui program kredit tanpa anggunan, persyaratan administrasi mudah dan tanpa bunga.
 8. Optimalisasi forum sinegistas peningkatan produktifitas, pelatihan vokasional, *skil development center* yang telah dilaksanakan Dinaketrans Provinsi Jambi.
 9. Menambah jangka waktu magang langsung (*on the spot*) ke dunia kerja hingga 6 bulan dan memiliki kurikulum magang sehingga lulusan tidak hanya siap secara teori tetapi juga siap secara praktik terutama terkait kedisiplinan dan phisikologi dunia kerja.
- Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya bakti.
- Antonio da paixao soares Pereira, A. Hakim, Suryadi. 2015. Implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (Sistem Informasaun Merkadu Trabalho). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 4 No.2 Tahun 2015.
- B.Suyanto dan S.Ariadi.2013. Penanganan Pengangguran Terdidik di Jawa Timur.Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol.26, No.4 Tahun 2013,hal.257-264.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2019. Provinsi Jambi Dalam Angka. BPS Provinsi Jambi , 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2019). *Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2017-2019*. Provinsi Jambi. BPS: Jambi.
- Bagong.S dan Septi. S, Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, Malang : in-TRANS Publishing 2013.
- Bloom DE, Canning D, Sevilla J. 2003. The Effect of health on Economic Growth. A Production Function Approach, 32, 1-13.
- D. Setiawan. 2013. Upaya Mengentaskan Pengangguran Terdidik Melalui Rintisan Desa Vokasi Berbasis Unggulan Daerah di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Empowerment : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 2 No.2 Tahun 2013.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, 2014. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan
- Elfindri, Dr. Prof. dan Nasri Bachtiar. Phd. 2004. Ekonomi

- Ketenagakerjaan. Padang :
Andalas University Press.
- Fithrian, M., Syechalad, N., & Nasir, M. (2015). Analisis Pengaruh Agregat Demand dan Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 23–32.
- Fitri. Junaidi. Pengaruh Pendidikan, Upah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi. *e-jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* Vol.5. No.1, Januari-April 2016.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti. (2008). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penurunan Penduduk Miskin. *Jurnal Institut Bogor*.
- Marlina Deliana, Kusdi raharjo, TW Afriyanti, 2019. Influence of Business Education on Entrepreneurial Intension with Feasibility and Entrepreneurial Self-Efficacy as Intervening Variables. *Jurnal Bisnis Manajemen*. Vol 20 No.2 (2019).
- Muhammad Nasir. (2017). Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Aceh Periode 2002-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* Volume 4 Nomor 1.
- Musfira Nur, dkk. 2016. Pengangguran Terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*, Juni 2016. Vol.5 No.1 : 29-33.
- Novita Sari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Lapangan Pekerjaan Di Sektor Informal Oleh Perempuan Nikah Di Desa Kuntu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2015.
- Prihanto, P.H. (2012). Tren dan Determinan Pengangguran Terdidik Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, April, 22-28.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Institut Bogor*.
- Sutomo, Vincent Hadiwiyono dan Prihartini BS, 1999. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja di Kabupaten Klaten. *Jurnal Analisis*, Juni 2016. Vol.5 No.1 : 29-33.
- Tilaar. 2004. Paradigma Baru Pendidikan nasional. Jakarta : Grasindo